



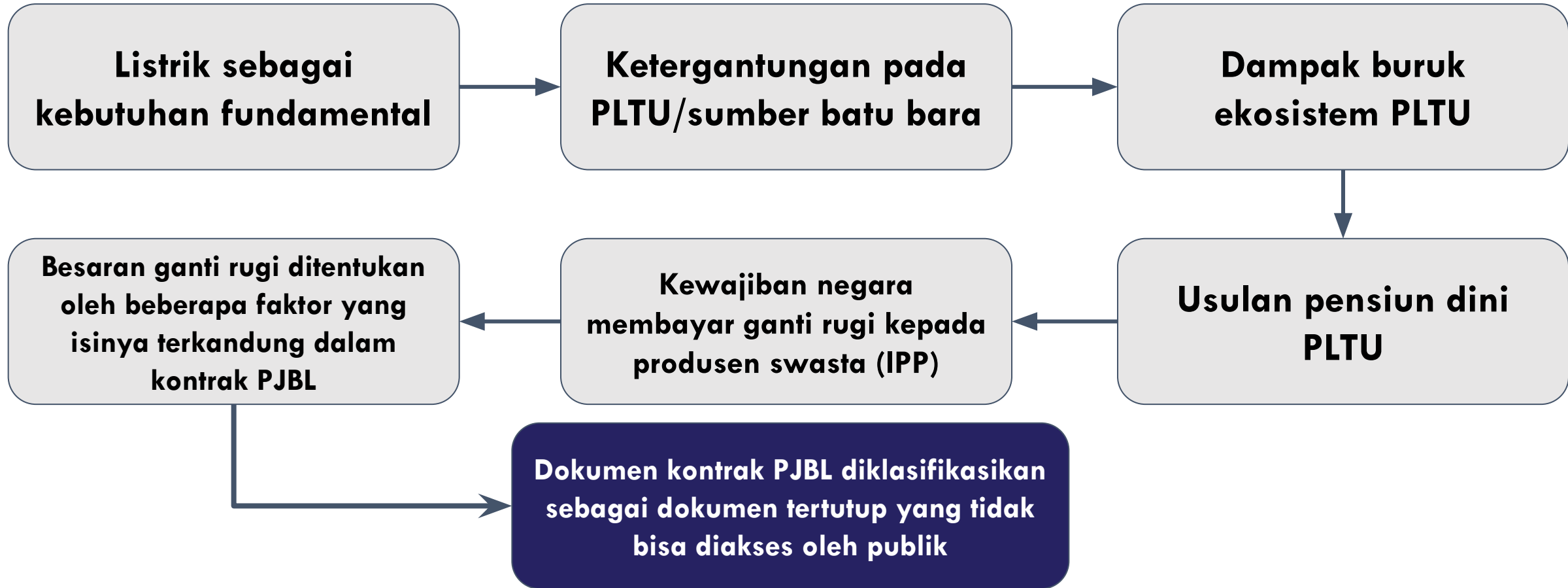
**BERHENTI  
MENGAYOMI  
KORUPSI**

# Transisi Energi dalam Krisis Transparansi: Ketertutupan Kontrak Listrik dan Implikasinya terhadap Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Indonesia Corruption Watch  
30 April 2026

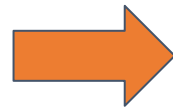
[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

# Latar Belakang



# Rumusan Masalah

PJBL antara PLN dan IPP diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan secara menyeluruh



Ketiadaan informasi PJBL menyulitkan pengawasan publik terhadap biaya, kompensasi, pemilihan PLTU yang dipensiunkan, dan potensi konflik kepentingan dalam proses pensiun dini.



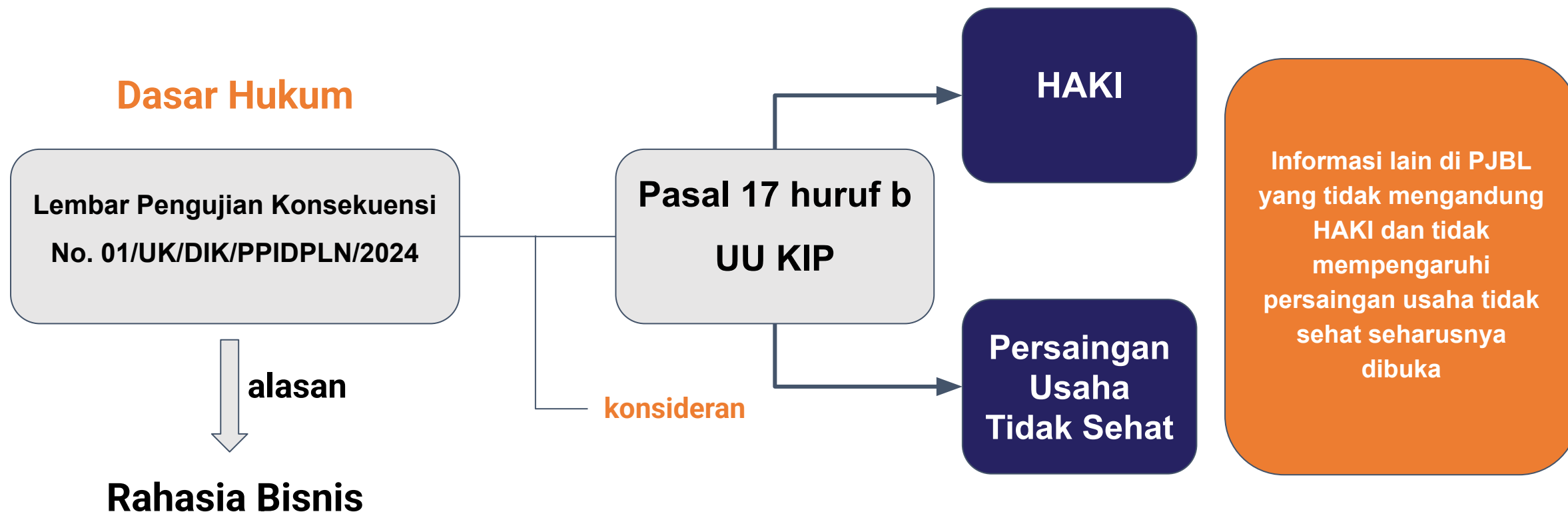
melemahkan keadilan prosedural dalam transisi energi.

# Jika Banyak Dampak Negatif dari PLTU, Mengapa Menutup PLTU Tidak Sederhana?





# Masalah Utama: Kontrak yang Tertutup





# informasi yang penting untuk dibuka

**Ketentuan**



Jangka waktu PJBL

Hak dan kewajiban  
penjual dan pembeli

Pengakhiran PJBL

Penyelesaian  
perselisihan

**Alasan**



Untuk mengetahui  
berapa lama  
perusahaan  
swasta akan  
memproduksi  
listrik

untuk mengetahui hak  
dan kewajiban  
penjual dan pembeli,  
terutama terkait  
dengan pelaksanaan  
kontrak

Untuk mengetahui dan  
menganalisis  
kapan PLTU selesai  
beroperasi dan  
memastikan perkiraan  
biaya yang  
diperlukan untuk  
memensiundikan  
PLTU

Untuk mengetahui  
tata cara yang  
ditempuh dalam hal  
terdapat perselisihan  
yang berpotensi  
timbul dalam transisi  
energi



# Mekanisme Menutup PLTU Pensiun Dini Batu Bara

**Skema  
Sukarela**

**Skema  
Diwajibkan**

**Skema  
Mandatori**



# Mekanisme Menutup PLTU Pensiun Dini Batu Bara

Apakah dampak kalau PJDB tidak dibuka?

Ketegasan dari pemerintah kepada  
pengusaha tambang batu bara

Bisa gak ditutup? sedangkan banyak

elit politik dibayar oleh batu bara



# Pendanaan Transisi Energi: Besarnya Biaya Berbanding Terbalik dengan Pengawasan

Pensiun Dini  
Memerlukan  
Pembiayaan yang  
besar dan berisiko  
disalahgunakan  
dengan pemberian  
kompensasi yang  
tidak proporsional

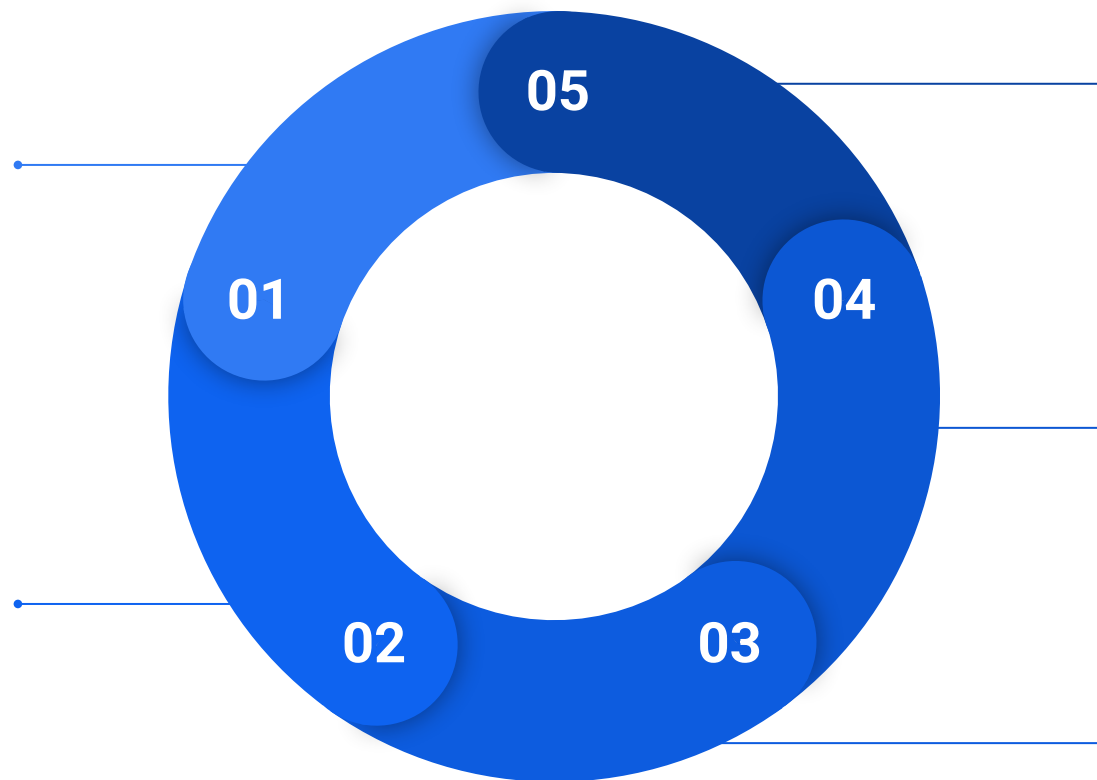
Agar proporsional,  
penghitungan biaya  
kompensasi pensiun  
dini PLTU dapat  
didasarkan pada  
nilai-nilai komponen  
yang tertuang dalam  
PJBL

Dengan mengacu pada  
PJBL, pembiayaan pensiun  
dini PLTU akan menjadi  
lebih tepat sasaran, adil,  
dan dapat  
dipertanggungjawabkan  
kepada masyarakat.

# Rekomendasi Kebijakan

Revisi Lembar Pengujian  
Konsekuensi Informasi No.  
01/UK/DIK/PPIDPLN/2024  
yang menutup seluruh  
informasi dalam kontrak yang  
dimiliki oleh PLN.

Menyusun standar  
keterbukaan PJBL oleh PLN  
dan Kementerian ESDM yang  
mengatur hal apa saja yang  
wajib untuk dibuka ke publik.



Integrasi prinsip transparansi  
pendanaan dalam setiap  
perjanjian pendanaan  
penutupan PLTU antara  
pendana dengan pemilik  
PLTU.

Mendorong partisipasi publik  
dalam transisi energi,  
terutama masyarakat yang  
terdampak (lingkungan  
sekitar dan pekerja)

Penguatan tata kelola  
perusahaan PLN sebagai  
badan publik yang wajib  
menaati prinsip good  
corporate governance.

**TERIMA  
KASIH**

